

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Purwita Sari<sup>1)</sup>, Feby Yoana Siregar<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

E-mail: [spurwitha@gmail.com](mailto:spurwitha@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Potensi Utama

E-mail: [yoansiregar13@gmail.com](mailto:yoansiregar13@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to analyze the implementation of the government's internal control system in the management of school operational assistance at SDN 060864. The research method is a descriptive type of research with a qualitative approach, namely solving the problem under investigation by describing the state of the institution that is running the government internal control system based on the facts. through interviews and direct observations in the field. The results of this study indicate that SDN 060864 has implemented the five elements of government internal control which include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring so that the financial management of school operational assistance funds (BOS) in SDN 060864 can be accounted for in a transparent and transparent manner. accountability in accordance with the principles of financial management according to Law Number 20 of 2003.*

**Keywords :** *Government Internal Control Systems, Financial Management, School Operational Assistance*

### 1. PENDAHULUAN

Manajemen keuangan yang baik sangat penting dalam mendorong manajemen keuangan. Penggunaan pola lama dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak sesuai dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan harus direspon oleh pemerintah guna meningkatkan perubahan yang mengarah pada terwujudnya good governance. Tantangan dalam mewujudkan tujuan di atas sangat berat, mengingat perilaku dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah menjalar pada permasalahan seperti korupsi.

Wilopo dalam penelitian (Kartikawati, 2016) menyatakan bahwa kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya di perusahaan di dunia pendidikan, terdapat kasus penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan sekolah seperti pengadaan aset sekolah, penyalahgunaan pengelolaan BOS, dan dana alokasi pendidikan khusus.

Bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintah yang memberikan dana langsung ke sekolah dengan besaran dana yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang aktif. Tujuan bantuan operasional sekolah adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang unggul, inovatif, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan dapat terwujud apabila semua pemerintah daerah dan lembaga pendidikan mampu melakukan kegiatan pengendalian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang efektif dan jujur, efisien, dan transparan. Kepala

Biara dkk. dan Wilopo dalam (Kartikawati, 2016) menyatakan bahwa untuk mengurangi kecurangan pada organisasi atau institusi pendidikan perlu diterapkan pengendalian internal yang efektif. Tujuan pengendalian intern adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.).

Dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, sistem pengendalian internal juga diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan karena setiap institusi baik di dunia pendidikan tentunya membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah seperti pembelian aset sekolah, pengembangan fasilitas sekolah, pembayaran gaji guru dan administrasi. staf. Oleh karena itu perlu adanya sekolah untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah guna mewujudkan visi dan misi sekolah. Adanya sistem pengendalian intern pemerintah pada lembaga pendidikan dilakukan dengan cara pengendalian, pemantauan, pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melindungi dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sehingga lembaga sekolah dapat menerapkan unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah yang terjadi di SDN 060864 dalam mengelola bantuan operasional sekolah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2012) dan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) menyebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses berkelanjutan dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai. dan keyakinan dalam pencapaian tujuan. penyelenggaraan melalui kegiatan yang efektif, efisien, andal dalam pelaporan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara komprehensif di lingkungan pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan hal yang melekat pada semua kegiatan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dan memberikan kepercayaan yang memadai daripada kepercayaan mutlak. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kriteria penjasar untuk mengukur efektivitas, perkembangan teknologi informasi. Melalui (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan paket reformasi keuangan negara menuju Good Governance atau pengelolaan keuangan yang baik dan pemerintahan yang baik, jujur, dan transparan.

(Kresiadanti, 2012) dalam penelitian (Kartikawati, 2016) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terjadi dalam kegiatan operasional keagenan dan merupakan bagian dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan sistem pengendalian internal dibuat untuk memberikan kepastian bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui efisiensi, efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teketel dan Berhanu, dalam penelitian (Kartikawati, 2016)

## **2.2 Elemen Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2012) terdapat lima unsur pengendalian intern, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian adalah lingkungan yang mencakup integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, tanggung jawab dan praktik sumber daya manusia.
- 2) Risk Assessment adalah pengendalian dengan memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh setiap unit organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi.
- 3) Kegiatan pengendalian merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk pengelolaan sumber daya negara dalam mencapai tujuan yang efektif.
- 4) Informasi dan komunikasi menyatakan bahwa kelancaran arus informasi dan komunikasi internal merupakan salah satu kunci untuk memastikan pengendalian internal yang efektif, informasi harus ditangkap secara jelas dan dikomunikasikan secara bertanggung jawab.
- 5) Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan evaluasi terhadap pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan agar pengendalian intern dapat berjalan secara transparan.

## **2.3 Manajemen Keuangan**

Kegiatan yang terjadi harus diatur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan yang terjadi di sekolah atau lembaga madrasah sangat membutuhkan regulasi yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan keuangan merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan operasional sekolah membutuhkan uang sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan substansi pendidikan, secara umum dinyatakan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian. (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia., 2013) menyatakan pengelolaan keuangan adalah perbuatan atau perbuatan pengelolaan atau penatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pengeluaran, pemantauan, dan pembukuan keuangan sekolah.

## **2.4 Bantuan Operasional Sekolah**

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2015) Bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintah yang menyediakan biaya non-pegawai bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sehingga dapat dikatakan dana BOS merupakan program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar guna menekan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2015) Tujuan umum BOS adalah membantu membiayai operasional sekolah dan biaya non kepegawaian, meringankan beban biaya operasional

sekolah bagi siswa di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara penyajian data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang berwenang dalam sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan dana BOS. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode analisis data penelitian yang digunakan untuk menjelaskan data, mengumpulkan data, dan menganalisis data dari objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berwenang bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan kegiatan pengawasan internal lembaga yang berfungsi memberikan penilaian independen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam proses pengelolaan dana BOS, lembaga SDN 060864 telah melakukan proses perencanaan keuangan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dan staf administrasi atau pengelola sekolah. Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah oleh tim pengelola dana BOS dan bendahara sekolah. Dari awal proses penyusunan rencana anggaran sekolah tentunya SDN 060864 telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Juknis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., n.d.-a).

Dan dari pengamatan langsung dan wawancara dengan kepala sekolah bahwa prosedur pelaksanaan dana BOS diawali dengan proses pendataan yang dilakukan pada aplikasi dapodik. Dari aplikasi dapodik, pemerintah mengetahui alokasi jumlah siswa yang aktif dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di sebuah instansi tersebut lalu operator sekolah menyinkronkan data sekolah ke server kemendikbud. Dengan adanya pendataan siswa yang dilakukan pihak sekolah dan operator maka penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dilakukan kepala sekolah dan bendahara sekolah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS sudah terlaksanakan dengan efektif karena dalam setiap kegiatan yang terjadi tentunya sistem pengendalian internal tidak pernah terlepas dari pengamatan dan penilaian pimpinan.

#### **4.2 Pembahasan**

Dalam menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah, peneliti menggunakan dua aspek yaitu unsur sistem pengendalian intern dan aspek pengelolaan keuangan BOS. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, diperoleh hasil wawancara bahwa kepala sekolah telah mengetahui lima unsur pengendalian intern yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian adalah lingkungan yang mencakup integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, tanggung jawab dan praktik sumber daya manusia. Melalui lingkungan pengendalian ini SDN 060864 mampu

- mewujudkan sistem pengendalian internal yang bersifat tanggung jawab, efektif, serta terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang saling bekerjasama.
- b. Penilaian risiko adalah pengendalian dengan memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh setiap unit organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang terjadi. Dengan adanya penilaian resiko SDN 060864 dapat menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam mengelola keuangan dana BOS sehingga dapat memperkecil resiko yang terjadi saat pengelolaan keuangan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS.
  - c. Kegiatan pengendalian adalah bagian dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk pengelolaan sumber daya negara dalam mencapai tujuan yang efektif.
  - d. Informasi dan komunikasi adalah menyatakan bahwa kelancaran arus informasi dan komunikasi internal merupakan salah satu kunci untuk memastikan pengendalian internal yang efektif, informasi harus ditangkap secara jelas dan dikomunikasikan secara bertanggung jawab. Informasi dan komunikasi sangatlah penting dalam semua kegiatan yang terjadi di organisasi karena melalui informasi dan komunikasi pimpinan dapat mengambil sebuah keputusan untuk masa depan instansi.
  - e. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan evaluasi terhadap pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan agar pengendalian intern dapat berjalan secara transparan. Proses pemantauan pada sistem pengendalian internal SDN 060864 telah dilaksanakan dengan pemantauan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan evaluasi atas penyusunan laporan dana BOS sehingga hasil pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan dana rutin, supervise sekolah, evaluasi guru-guru dalam proses pembelajaran di kelas, dan menyusun laporan dana BOS triwulan.

Dari unsur-unsur pengendalian intern SDN 060864 telah menerapkan lima unsur pengendalian intern, hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern sangat penting dalam kegiatan operasional setiap instansi atau organisasi di belahan dunia manapun sehingga kelima unsur pengendalian intern tersebut harus dilaksanakan agar pengelolaan keuangan BOS dapat dilaksanakan, dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah mengenai aspek pengelolaan dana BOS disebutkan bahwa SDN 060864 telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., n.d.-b) yang terdiri dari :

- 1) Prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dimana prinsip ditekankan bahwa terbukanya dalam mengelola suatu kegiatan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat orang tua siswa atau masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional sekolah.
- 2) Prinsip akuntabilitas adalah pengelolaan dana yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman yang telah disepakati. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performancenya dalam menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Prinsip efektif diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Apabila prinsip efektif dapat tercapai maka pengelolaan keuangan dapat memenuhi tujuan visi dan misi lembaga sehingga prinsip efektif yang diterapkan dapat mengatur dan mengelola dana BOS untuk membiayai kegiatan operasional sekolah terkait dengan kualitas yang direncanakan.
- 4) Prinsip efisien merupakan kualitas dari hasil suatu kegiatan. Kata efisien adalah perbandingan yang antara masukan dan keluaran atau daya dan hasil. Daya yang dimaksud merupakan

tenaga, pikiran, waktu, dan biaya sedangkan hasil merupakan kegiatan yang penggunaan waktu, tenaga, dan biaya memberikan hasil sebaik-baiknya mulai dari kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa SDN 060864 telah menerapkan prinsip efisien dalam sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan dana BOS sehingga dalam penggunaan uangnya memberikan masukan dan keluaran yang menghasilkan kualitas dan kuantitas baik untuk sekolah dan para guru.

Moeller dalam (Hindriani et al., 2012) menyatakan bahwa pengendalian internal dapat dilihat sebagai proses terintegrasi dalam tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan kepercayaan terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan pelaporan keuangan yang efektif, efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepatuhan. peraturan. peraturan perundang-undangan yang dilihat dalam perencanaan pengelolaan keuangan.

Lipham dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia., 2013) menyatakan bahwa beberapa kegiatan pengelolaan keuangan, yaitu memperoleh dan menentukan sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah di Bentuk dana BOS dapat diterapkan dengan adanya perencanaan program sekolah, pendanaan pendapatan, dana belanja, dan penggunaan dana sehingga kelima elemen sistem pengendalian internal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi dan misi SDN 060864.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SDN 060864 telah menerapkan lima unsur sistem pengendalian yang meliputi pengendalian lingkungan untuk membangun etika dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BOS yang jujur dan transparan, penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dana BOS, kegiatan pengendalian, pelaksanaan review yang selalu dilakukan dalam mengelola keuangan dana BOS, informasi dan komunikasi diperlukan dalam pengelolaan keuangan dana BOS agar dapat memberikan informasi yang relevan dan terpercaya untuk disampaikan kepada masyarakat, masyarakat dan pemerintah daerah, pemantauan, dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan BOS.

Saran yang akan disampaikan ialah Pemerintah lebih menguatkan perbaikan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) sehingga Instansi dan organisasi lainnya bisa menerapkan SPIP Peraturan Pemerintah yang terbaru dan proses pengelolaan keuangan sekolah harusnya diperbaiki sesuai dengan peraturan terbaru.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bendahara Sekolah, dan seluruh Staff Tenaga Kependidikan SDN 060864 yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(3), 1–9.
- Kartikawati, K. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Manajemen Keuangan Sekolah. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 4(1), 13–25.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.-a). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar*.
- Kresiadanti, A. R. R. (2012). Pengaruh Internal Control Dan Internal Auditor Terhadap Akuntabilitas Di Universitas Brawijaya (Studi pada Fakultas dan Program di Universitas Brawijaya yang telah di audit oleh Satuan Pengendalian Internal Universitas Brawijaya tahun 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. (2013). *Manajemen Keuangan Sekolah / Madrasah*.